

**PENGARUH RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**

**TIKA ANGGRAIN¹
SUTARYO²**

Universitas Sebelas Maret

Abstract

The research aims to examine the effect of financial ratios (Ratio Degree of Decentralization, Local Financial Dependency Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Ratio Effectiveness of Locally Generated Revenue and Ratio Effectiveness of Local Tax) to Human Development Index. Human Development Index is used as a benchmark to assess the performance of local governments in the provision of public services. The population in this study is the Provincial Government in Indonesia. The data used is the Local Government Finance Report in 2010, 2011 and 2012 to predict the Provincial Human Development Index in 2011, 2012 and 2013. Data were obtained from the website of the BPK, then analyzed using multiple regression.

The results of this study indicate that the ratio of Degrees of Decentralization, effect on the Human Development Index (HDI). While the other four independent variable no effect on the HDI. This study has limitations, limitations specific data so that the population used is the provincial.

Keywords: *Human Development Index (HDI), the performance of the provincial government, public services, financial ratios.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh rasio keuangan (Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam hal penyediaan layanan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010, 2011 dan 2012 untuk memprediksi IPM Provinsi tahun 2011, 2012 dan 2013. Data diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan empat variabel independen yang lain tidak berpengaruh terhadap IPM. Penelitian ini memiliki keterbatasan, keterbatasan data tertentu sehingga populasi yang digunakan adalah pemerintah provinsi.

Kata Kunci: *Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kinerja pemerintah provinsi, layanan publik, rasio keuangan.*

¹ Authors Correspondency: star.piet@gmail.com

1. Pendahuluan

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pemerintah provinsi di Indonesia. Otonomi daerah diberlakukan mulai tahun 1999 melalui Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan didaerahnya dengan tetap memegang aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Otonomi daerah membuat pemerintah daerah diberi mandat berupa tugas-tugas yang harus dijalankan. Salah satu tugas utama pemerintah daerah yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum menjadi tugas pokok pemerintah daerah. Kesejahteraan masyarakat tercapai ketika pemerintah daerah telah memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat. Dalam memberikan layanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan dana yang memang ditujukan untuk hal tersebut. Otonomi daerah tidak hanya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya terkait pembangunan, tetapi juga memberikan wewenang terkait dengan keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian pendapatan yang akan digunakan dalam pembangunan daerah juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, termasuk dana yang akan digunakan dalam aktivitas pendanaan layanan publik bagi masyarakat.

Dalam Katalog BPS tentang Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan bahwa IPM digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia disuatu wilayah melalui penyediaan layanan publik yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan

membawa dampak yang baik pula bagi tersedianya layanan publik. Dengan layanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan aspek kehidupan masyarakat dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian sebelumnya mengenai IPM telah dilakukan, diantaranya adalah Ardiansyah *et al* (2014) dan Amalia dan Purbadharmaja (2014). Namun penelitian ini menggunakan 5 rasio keuangan yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan cakupan sampel pemerintah provinsi di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

A. Tinjauan Pustaka

a. Teori Agensi

Jensen *et al* (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) terlibat dengan orang lain (*agent*) untuk melakukan pelayanan kepada mereka yang melibatkan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada *agent*.

Sejak otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2001, perspektif keagenan (*agency theory*) dapat digunakan disektor publik. UU tersebut memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat (legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai salah satu entitas pelapor setiap periodenya pemerintah daerah juga membuat laporan yang disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Bab I Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dalam setiap periodenya akan memuat anggaran yang direncanakan dan akan memuat realisasi dari anggaran tersebut. Dari anggaran yang ditetapkan diperbandingkan dengan realisasi akan tampak bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya. Selain kedua hal itu masih banyak lagi informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat bermanfaat untuk mengukur kinerja atau untuk kegunaan lainnya.

c. Rasio Derajat Desentralisasi

Rondinelli (1989) menekankan desentralisasi sebagai "*transfer of political power*". Sedangkan Pratikno (2005) dalam Amani dan Dariwardani (2009) berpendapat bahwa pola hubungan pusat - daerah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru merupakan pola hubungan yang sentralistis. Dalam pola hubungan yang sentralistis pemerintah pusat mendominasi segala segi pemerintahan. Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007: 128).

d. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu pemerintah provinsi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada umumnya, kontribusi terbesar pendapatan transfer terdapat pada dana perimbangan seperti dana alokasi umum, yaitu dana yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Rasio ini adalah perbandingan antara total realisasi pendapatan transfer dengan total realisasi pendapatan daerah (Mahmudi, 2007: 128)

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007: 128).

Pendapat lain mengatakan bahwa rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Widodo, 2001).

f. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Dalam rasio tersebut akan diperoleh perbandingan antara PAD yang telah ditargetkan dengan PAD yang terealisasi. Angka rasio efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan bahwa

pemerintah daerah tersebut telah mampu memenuhi target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya. (Mahmudi, 2007: 129).

g. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Pajak berguna bagi negara untuk menyelenggarakan pembangunan dan untuk menyediakan layanan publik yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak harus dilakukan sebaik mungkin agar penggunaan pajak memenuhi kriteria efektif.

Rasio efektivitas pajak daerah berguna untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak yang harus diterima sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan (Mahmudi, 2007: 129)

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

UNDP (*United Nations Development Programme*) melalui *Human Development Report* tahun 1996 melakukan publikasi tentang Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai serta standar hidup layak. Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*).

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi masing-masing daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya atau disebut Otonomi Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pembangunan lebih berhasil sehingga salah satu indikator pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) dihipotesiskan akan meningkat pula (Rondinelli dan Cheema, 1983; Davoodi dan Zou 1999; Fisman dan Gatti, 2002; Devas dan Grant, 2003; Anand dan Sen, 2000).

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Derajat Desentralisasi merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan (Mahmudi, 2007: 128). Melalui rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD.

Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah dalam membangun layanan publik bagi masyarakat. Jika layanan publik dapat terpenuhi dengan baik diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat meningkat.

Setyowati dan Suparwati (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap IPM. Dalam penelitian tersebut dikemukakan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dalam penelitian tersebut PAD merupakan salah satu komponen dalam menghitung rasio derajat desentralisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis seperti berikut ini.

H1: Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Rasio ketergantungan keuangan daerah membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan yang diperoleh suatu daerah. Rasio tersebut ditujukan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat. Semakin

tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2007: 128).

Ardiansyah *et al* melakukan penelitian dengan menguji apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap IPM, dimana DAU merupakan salah satu komponen dari pendapatan transfer. Dalam penelitian tersebut dikemukakan hasil bahwa DAU berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM.

Apabila pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah pusat maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang baik, sehingga pelaksanaan penyediaan layanan publik dapat terpenuhi dengan baik dan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis seperti berikut ini.

H2: Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada daerahnya. Dengan kata lain rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber daya yang berasal dari eksternal. Kemandirian setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan daerah (Mahmudi, 2007: 128). Semakin tinggi rasio tersebut maka pemerintah daerah semakin berpotensi menyediakan layanan publik yang baik sehingga peningkatan IPM dapat tercapai.

Amalia dan Purbadharmaja (2014) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi dan Sutrisna (2014) juga mengemukakan hasil bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis seperti berikut ini.

H3: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

4. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi belum tentu dapat melaksanakan tugas penyediaan layanan publiknya secara baik jika pendapatan yang diterima tidak dikelola dengan baik. Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya bergantung pada nominal pendapatannya, namun juga tata cara pengelolaannya.

Amani dan Dariwardani (2009) mengatakan bahwa tujuan politik dari pemerintah adalah demokratisasi, sedangkan tujuan administratifnya adalah dalam rangka efektivitas. Efektivitas yang dimaksud merupakan efektivitas dalam pengelolaan PAD yang merupakan salah satu sumber pendanaan. Setyowati dan Suparwati (2012) dan Ardiansyah *et al* (2014) meneliti pengaruh PAD terhadap IPM. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Pemerintah daerah yang mengelola PAD secara efektif diharapkan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam hal penyediaan layanan publik. Sehingga dengan layanan publik yang baik akan tercapai IPM yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis seperti berikut ini.

H4: Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

5. Pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Arus masuk yang dimiliki pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya berasal dari pendapatan pajak yang diperoleh suatu pemerintah daerah. Pendapatan pajak berkontribusi cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk kembali digunakan dalam pembiayaan pembangunan fasilitas layanan publik dan sebagainya.

Mengingat pendapatan pajak merupakan salah satu komponen dari arus masuk yang dimiliki pemerintah, baik atau buruknya pengelolaan pajak yang diterima menjadi satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Jika pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan efektif, maka tidak akan menghambat proses pembiayaan pembangunan fasilitas layanan publik bagi masyarakat.

Zou dan Davoodi (1999), dalam penelitiannya mengemukakan hasil bahwa *Average Tax Rate* berpengaruh positif signifikan terhadap *Per Capita Output Rate*, dimana *Per Capita Output Rate* tersebut digunakan sebagai dasar peningkatan *Human Development Index*. Efektivitas pajak yang semakin tinggi akan memungkinkan pemerintah daerah memiliki kecukupan dana yang baik dalam menyediakan layanan publik. Dalam publikasi BPS mengenai IPM, penyediaan layanan publik yang baik diharapkan akan meningkatkan IPM sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis seperti berikut ini.

H5: Rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3. METODOLOGI PENELITIAN

a. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2012. Sampel penelitian ini diperoleh menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel yaitu: Pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2010-2012; pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2010-2012 yang menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan di audit; pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2010-2012 yang mempunyai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia; dan pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2010-2012 yang menyajikan data keuangan untuk digunakan dalam perhitungan rasio.

Terdapat 99 pemerintah provinsi di Indonesia selama 2010-2012. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, sampel penelitian ini sebanyak 80 pemerintah provinsi.

INSERT TABEL 1

b. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari berbagai macam sumber, sebagai berikut.

INSERT TABEL 2

c. Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari 5 rasio keuangan, yaitu Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Raiso Efektivitas Pendapatan Asli Dearah (PAD) dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah. Lebih lanjut, variabel dapat dijelaskan pada tabel berikut.

INSERT TABEL 3

d. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model regresi berganda sebagai berikut.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

| | |
|-------------|--|
| Y | Skor IPM (Indeks Pembangunan Manusia) |
| X_1 | Rasio Derajat Desentralisasi |
| X_2 | Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah |
| X_3 | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah |
| X_4 | Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| X_5 | Rasio Efektivitas Pajak Daerah |
| b_0 | Konstan |
| $b_1 - b_5$ | Koefisien regresi |
| E | <i>Error</i> |

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

INSERT TABEL 4

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa sampel (N) pada penelitian ini adalah 80 buah. Dari tabel dapat diketahui nilai minimum variabel IPM adalah 65,36 dan nilai maksimum 78,33 dengan nilai rata-rata 73,2043. Rata-rata untuk Rasio Derajat Desentralisasi adalah 0,411105. Rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 0,544801, sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki rata-rata 1,096269. Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah memiliki nilai rata-rata masing-masing 1,077149 dan 1,059104.

B. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

INSERT TABEL 5

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengujian normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,971. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan bahwa angka tersebut lebih dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

INSERT TABEL 6

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* (0,148; 0,217; 0,282; 0,533; 0,679) untuk semua variabel menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,1. Begitu pula dengan nilai *VIF* (6,757; 4,600; 3,546; 1,875; 1,473) untuk semua variabel menunjukkan angka yang lebih kecil dari 10. Dari hasil pengujian multikolinieritas dapat diketahui bahwa model-model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

INSERT TABEL 7

Penelitian ini menggunakan *Runs Test* untuk uji autokorelasi dengan melihat *asympt sig (2-tailed)*. Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *asympt. sig (2-tailed)* dari *Runs Test* adalah 0,072 ($>0,05$). Nilai 0,072 ($>0,05$) menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengandung gejala autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

INSERT TABEL 8

Ada tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui dengan melihat tingkat signifikansinya terhadap α 5%. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi (0,349; 0,158; 0,742; 0,379; 0,472) untuk semua variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti menunjukkan model-model regresi yang digunakan dalam penelitian tersebut tidak mengalami gejala heterokedastisitas.

C. Uji Model Regresi (*Goodness of Fit*)

a. Uji Koefisien Deretminasi (R^2)

INSERT TABEL 9

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *R Square* dari hasil uji model regresi sebesar 0,179. Ini berarti bahwa variabel independen yang terdapat dalam penelitian tersebut mampu menggambarkan 18% dari variabel dependennya. Sementara sisanya, yaitu sebesar 82% digambarkan oleh variabel independen yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji Statistik F

INSERT TABEL 10

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari uji statistik F adalah 0,011. Nilai signifikan dari uji statistik F tersebut menunjukkan angka $<0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa data secara keseluruhan layak untuk diteliti. Dapat dikatakan pula bahwa model regresi fit untuk diteliti.

D. Uji Koefisien Regresi

INSERT TABEL 11

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi memiliki signifikansi sebesar 0,008 ($<0,01$) dengan nilai t positif 2,709. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012), menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap IPM. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi yang dihitung dari hasil pembagian antara PAD dengan Total Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap IPM.

Rasio Derajat Desentralisasi yang semakin tinggi menunjukkan bahwa PAD yang dimiliki Provinsi juga semakin tinggi. Dengan PAD yang tinggi pemerintah provinsi memiliki sumber daya pendanaan yang semakin tinggi, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan pengadaan layanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. Layanan publik yang baik dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,607 ($>0,1$), membuktikan bahwa variabel independen yang berupa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh tidak signifikan.

Rasio ketergantungan keuangan daerah dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pembagian antara pendapatan transfer dengan total pendapatan. Pendapatan transfer merupakan bagian dari total pendapatan pemerintah provinsi secara keseluruhan. Namun pendapatan transfer tersebut bukanlah sumber pendanaan utama bagi pelaksanaan program pemerintah.

Dalam penelitian ini, sebagian besar LKPD memiliki PAD yang rendah, padahal PAD merupakan sumber daya utama dalam pembiayaan pelaksanaan program kerja pemerintah. Dengan PAD yang rendah, maka PAD tidak dapat digunakan untuk menutup kebutuhan yang terdapat pada pos belanja operasi. Akibatnya, pendapatan transfer yang diperoleh digunakan untuk menutup kekurangan dana pada pos belanja operasi. Dengan demikian tidak terdapat

alokasi yang cukup untuk pos belanja modal, yaitu pos belanja yang berhubungan dengan pengadaan layanan publik.

Dari analisis di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan transfer tidak akan berpengaruh terhadap pengadaan layanan publik dikarenakan pendapatan transfer digunakan untuk menutup pos belanja operasi yang tidak mampu dipenuhi hanya dengan PAD. Jika pengadaan layanan publik tidak terpengaruh, begitu pun dengan IPM. IPM yang diukur dari pengadaan layanan publik juga tidak akan terpengaruh oleh pendapatan transfer.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan nilai signifikansi 0,056 ($<0,1$). Dari hasil tersebut diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil tersebut berbeda dengan yang telah dihipotesiskan sebelumnya. Dalam hipotesis disebutkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan.

Dalam penelitian ini Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan membagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Transfer Pusat dan Pinjaman. Sebagian besar pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2012 memiliki PAD yang rendah, sehingga walaupun pemerintah provinsi memiliki PAD yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan transfer dan pinjaman, sebenarnya PAD yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan pada pos belanja operasi. Apabila kebutuhan pos belanja operasi belum terpenuhi dengan baik, maka pos belanja modal yang berkaitan dengan layanan publik juga tidak akan terpenuhi dengan baik.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan yang baik dapat menurunkan kualitas layanan publik dikarenakan anggaran yang dimiliki terserap untuk pos belanja operasi. Padahal layanan publik juga membutuhkan dana bukan hanya untuk menambah fasilitas, namun juga mempertahankan kualitas layanan publik agar tidak menurun. Apabila anggaran untuk pemeliharaan layanan publik tidak terpenuhi maka akan

menurunkan IPM sebagai gambaran dari baik atau buruknya layanan publik. Dalam Tabel 4.8 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki signifikansi kurang dari 0,1, namun arah yang berbeda dengan yang terdapat dalam hipotesis.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Dalam hasil uji koefisien regresi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,236 ($>0,1$).

PAD dalam sebagian besar LKPD Pemerintah Provinsi memiliki nominal yang rendah. Hal ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dipenuhi dalam pos belanja operasi maupun pos belanja modal. Dengan demikian walaupun PAD yang dapat direalisasikan oleh pemerintah provinsi telah mencapai target atau melebihi target yang dianggarkan, sesungguhnya PAD tidak mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang terdapat dalam pos belanja operasi. Jika sebagian besar atau seluruh PAD digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang terdapat dalam pos belanja operasi, maka PAD tidak mampu digunakan untuk memenuhi aktivitas dalam pos belanja modal. Dimana pos belanja modal tersebut merupakan pos pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan layanan publik.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa PAD pemerintah provinsi yang melebihi target penerimaan tidak mempengaruhi pengadaan layanan publik bagi masyarakat. Dengan demikian, IPM sebagai gambaran keberhasilan pemerintah dalam pengadaan layanan publik juga tidak akan terpengaruh.

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi dapat diketahui bahwa Rasio Efektivitas Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa Rasio Efektivitas Pajak Daerah memiliki nilai signifikansi 0,775 ($>0,1$).

Pajak merupakan salah satu komponen dari PAD. Walaupun pajak daerah mampu direalisasikan melebihi anggaran yang direncanakan namun PAD secara keseluruhan masih terbilang minim dalam hal memenuhi kebutuhan pemerintah. Sebagian besar atau seluruh PAD masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang terdapat dalam pos belanja operasi, bukan pos belanja modal yang berkaitan dengan pengadaan layanan publik.

Dari analisis di atas dapat diketahui bahwa pajak yang direalisasikan melebihi anggaran kenyataannya tidak dipergunakan untuk mendanai aktivitas pos belanja modal. Akibatnya, aktivitas pos belanja modal terutama pengadaan layanan publik tidak mampu terselenggara dengan baik. Maka pajak yang dapat direalisasikan melebihi anggarannya tidak mempengaruhi IPM sebagai gambaran keberhasilan pengadaan layanan publik oleh pemerintah provinsi.

1. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

a. Simpulan

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan meningkatkan IPM sebagai salah satu gambaran dari keberhasilan penyediaan layanan publik. simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap IPM. Namun Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki arah yang berbeda. Sedangkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM.

b. Keterbatasan, Saran, dan Implikasi

Penelitian ini Penelitian ini hanya menggunakan populasi penelitian pemerintah provinsi di Indonesia dikarenakan keterbatasan data IPM dilevel kabupaten/kota. Hal ini

mengakibatkan kemungkinan hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk semua tingkat pemerintah daerah, misalnya pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan data IPM yang merupakan data jadi. Data IPM diambil langsung dari *website* BPS yang dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan BPS dan penulis belum mengkonfirmasi hasil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F.R. dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 6
- Amani, Siti Noor dan Ni Made Inna Dariwardani. 2009. Kinerja Provinsi di Indonesia Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah. *www.artikel.com*
- Anand, Sudhir dan Amartya Sen. 2000. The Income Component oh the Human Development Index. *Journal of Human Development*, Vol. 1, No. 1.
- Ardiansyah, Vitalis Ari dan Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Dearah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akunstansi 17*.
- Astri, Meylina. Nikensari, S.I. dan Kuncara, Harya. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis* Vol 1, No.1.UNJ. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. Katalog BPS: 4102002. *Indeks Pembangunan Manusia*. BPS Jakarta-Indonesia
- Davoodi, H. dan Zou, H.F. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43: 244-257.
- Devas, N. dan Grant, U. 2003. Local Government Decision-Making-Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence from Kenya and Uganda. *Public Administration and Development*, 23.
- Dewi, P.A.K dan I Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 4, No. 1.
- Fisman, R. dan Gatti, R. 2002. Decentralization and Corruption: Evidence across Countries. *Journal of Public Economics*, 83: 325-345.
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20 Edisi 6. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar: Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Jensen, M., dan Meckling, W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.
- Lugastoro, Dectra Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pemngambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Poliik. Yogyakarta: Unit Penerbitdan Percetakan YKPN.
- Mouw, Erland. 2013. Kualistas Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal UNIERA Vol 2 Nomor 2; ISSN 2086-0404*

- Republik Indonesia. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- _____. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- _____. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- _____. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- _____. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- _____. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- _____. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta
- _____. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Rondinelli, D.A. dan Cheema, G.S. 1983. Implementing Decentralization Policies: An Introduction, in *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, edited by G.S. Cheema & Rondinelli, D.A., Beverly Hills, California, Sage.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi* Vol. 9 No. 1.
- Sumardjoko, Imam. 2014. Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat dengan Belanja Modal Sebagai Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi 17*.
- UNDP. 2004. *Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia*. <http://www.undp.or.id>, diakses pada tanggal 14 November 2015
- Widodo, Adi. Waridin. dan Maria, Johanna. 2001. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.

LAMPIRAN

Tabel 1
Sampel dan Observasi Penelitian

| No | Kriteria | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | Pemerintah Provinsi di Indonesia | 33 | 33 | 33 | 99 |
| 2 | Tidak menerbitkan LKPD dan diaudit | (3) | (1) | (10) | (14) |
| 3 | Tidak mempunyai nilai IPM terpublikasi di BPS | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 4 | Tidak menyajikan data keuangan perhitungan | (2) | (1) | (2) | (5) |
| Jumlah Sampel | | 28 | 31 | 21 | 80 |

Tabel 2
Data dan Sumber Data

| No | Data | Sumber Data |
|----|------|--------------------------------|
| 1. | IPM | Badan Pusat Statistik (BPS) |
| 2. | LKPD | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) |

Tabel 3
Variabel dan Pengukuran Variabel

| Nama | Akronim | Pengukuran |
|---------|--------------------------------|--|
| IPM | Indeks Pembangunan | <i>Realisasi PAD</i> |
| | Manusia | <i>Target Penerimaan PAD</i> |
| RDD | Rasio Derajat | <i>Biaya Pemerolehan PAD</i> |
| | Desentralisasi | <i>Target Penerimaan PAD</i> |
| RKetKD | Rasio Ketergantungan | <i>Realisasi Penerimaan Pajak Daerah</i> |
| | Keuangan Daerah | <i>Target Penerimaan Pajak Daerah</i> |
| RKemKD | Raiso Kemandirian | <i>Realisasi PAD</i> |
| | Keuangan Daerah | <i>Target Penerimaan PAD</i> |
| REfePAD | Rasio Efektivitas | <i>Biaya Pemerolehan PAD</i> |
| | Pendapatan Asli Daerah | <i>Target Penerimaan PAD</i> |
| REfePD | Raiso Efektivitas Pajak Daerah | <i>Realisasi Penerimaan Pajak Daerah</i> |
| | | <i>Target Penerimaan Pajak Daerah</i> |

Tabel 4
Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|----------|----------------|
| RDD | 80 | 0,0279 | 0,7795 | 0,411105 | 0,1843254 |
| RKetKD | 80 | 0,0224 | 0,9718 | 0,544801 | 0,2029733 |
| RKemKD | 80 | 0,0676 | 3,7548 | 1,096269 | 0,8654949 |
| REfePAD | 80 | 0,0364 | 1,5375 | 1,077149 | 0,1854827 |
| REfePD | 80 | 0,0115 | 1,6308 | 1,059104 | 0,2538111 |
| IPM | 80 | 65,36 | 78,33 | 73,2043 | 2,70187 |
| Valid N (listwise) | 80 | | | | |

Keterangan: RDD = Rasio Derajat Desentralisasi, RKetKD = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, RKemKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, REfePAD = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, REfePD = Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Variabel Dependen = IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Tabel 5
Uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| | N | 80 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0,0000000 |
| | Std. Deviation | 2,44748962 |
| | Absolute | 0,055 |
| Most Extreme Differences | Positive | 0,050 |
| | Negative | -0,055 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 0,488 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | 0,971 |

Tabel 6
Uji Multikolinieritas

| Model | Sig. | Collinearity Statistics | |
|------------|-------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| (Constant) | 0,000 | | |
| RDD | 0,008 | 0,148 | 6,757 |
| RKetKD | 0,607 | 0,217 | 4,600 |
| RKemKD | 0,056 | 0,282 | 3,546 |
| REfePAD | 0,236 | 0,533 | 1,875 |
| REfePD | 0,775 | 0,679 | 1,473 |

Keterangan: RDD = Rasio Derajat Desentralisasi, RKetKD = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, RKemKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, REfePAD = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, REfePD = Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Variabel Dependen: IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Tabel 7
Uji Autokorelasi

| Unstandardized Residual | |
|--------------------------------|---------|
| Test Value ^a | 0,22533 |
| Cases < Test Value | 40 |
| Cases >= Test Value | 40 |
| Total Cases | 80 |
| Number of Runs | 33 |
| Z | -1,800 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0,072 |

Tabel 8
Uji Heterokedastisitas

| Model | T | Sig. |
|--------------|----------|-------------|
| (Constant) | -0,326 | 0,745 |
| RDD | 0,943 | 0,349 |
| RKetKD | 1,426 | 0,158 |
| RKemKD | -0,331 | 0,742 |
| REfePAD | 0,885 | 0,379 |
| REfePD | -0,723 | 0,472 |

Keterangan: RDD = Rasio Derajat Desentralisasi, RKetKD = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, RKemKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, REfePAD = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, REfePD = Rasio Efektivitas Pajak Daerah.
Variabel Dependen: IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Tabel 9
Uji Koefisien Deretminasi (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | 0,424 ^a | 0,179 | 0,124 | 2,52882 |

Tabel 10
Uji Statistik F

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|
| Regression | 103,481 | 5 | 20,696 | 3,236 | 0,011 ^b |
| Residual | 473,226 | 74 | 6,395 | | |
| Total | 576,707 | 79 | | | |

Tabel 11
Uji Koefisien Regresi

| Model | Sign | Unstandardized | | Standardized | T | Sig. |
|------------|------|-------------------|---------------|----------------------|--------|-------|
| | | Coefficients B | Std. Error | Coefficients Beta | | |
| (Constant) | | 66,091 | 2,692 | | 24,548 | 0,000 |
| RDD | + | 10,871 | 4,012 | 0,742 | 2,709 | 0, |
| RKetKD | - | 1,551 | 3,007 | 0,117 | 0,516 | 0,607 |
| RKemKD | + | -1,200 | 0,619 | -0,384 | -1,939 | 0,056 |
| REfePAD | + | 2,508 | 2,100 | 0,172 | 1,194 | 0,236 |
| REfePD | + | 0,390 | 1,360 | 0,037 | 0,287 | 0,775 |

Keterangan: RDD = Rasio Derajat Desentralisasi, RKetKD = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, RKemKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, REfePAD = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, REfePD = Rasio Efektivitas Pajak Daerah.
Variabel Dependen: IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

a = signifikan pada α 1%